



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

PERSPEKTIF PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DALAM PENANAMAN NILAI DAN ETIKA SERTA HAK ASASI MANUSIA DI ERA GLOBAL

Suswandari

Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP Universitas Muhammadiyah
Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA)

ABSTRAK

Era global, tidak dapat dihindari oleh siapapun. Perubahan-perubahan yang menyertainya pun tidak dapat dielakkan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun juga. Nilai dan Etika serta HAM, sebagai peradaban universal, telah dijadikan sebagai tolak ukur kehidupan suatu bangsa secara terintegralistik. Bagaimana, perlindungan terhadap HAM, dapat menentukan bagaimana pula kehidupan nilai dan etikanya. Bangsa Indonesia, yang telah mempunyai suatu sistem nilai dan etik yang terangkum dalam Pancasila, sedang mendapatkannya ujiannya saat ini dengan munculnya berbagai konflik vertikal maupun horizontal di berbagai tempat. Di era global tampaknya perlu direnungkan kembali tentang penghayatan dan pengamalan Pancasila yang telah dilakukan selama ini. Perlu dicari terobosan-terobosan baru, dengan pendekatan budaya yang tepat melalui pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS sebagai pembelajaran yang bertanggung jawab pada pembentukan soft skill kebangsaan, moral, nilai dan etika menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa Indonesia saat ini dan selanjutnya.

Kata kunci: Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Penanaman Nilai Etika

PENDAHULUAN

Manusia dengan segala kompleksitasnya selalu menarik untuk dijadikan sebagai bahan kajian Ilmu-Ilmu Sosial dengan berbagai pendekatannya. Lahirnya Ilmu-Ilmu Sosial dalam kancah perkembangan peradaban manusia tidak terlepas dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial dalam menghadapi tantangan hidupnya. Kehidupan manusia di permukaan bumi ini baik yang menyangkut aspek fisik, maupun yang menyangkut aspek sosial budaya, senantiasa mengalami perubahan. Konteks perubahan sebagaimana disebutkan oleh Nursid Sumaatmadja (1981: 12) bahwa, " ... tiada yang kekal abadi di permukaan bumi ini, yang kekal



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

hanyalah Tuhan dan perubahan itu sendiri, untuk memahami itulah diperlukan suatu perjuangan hidup bagi umat manusia untuk dapat survive.

Perjuangan hidup umat manusia tidak dapat dilepaskan dari keinginan manusia dalam mengejar kebermaknaan nilai kehidupan. Dengan demikian, adanya interaksi sosial antar manusia tidak dapat dihindarkan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun selama masih tercakup dalam lingkungan kehidupan manusia. Interaksi sosial inilah yang akan menandai bahwa kehidupan manusia adalah kehidupan yang dinamis, selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. (Jalaluddin Rakhmat, 199:45). Lebih dari itu, Jalaluddin Rahmat dalam salah satu analisisnya juga mengatakan :

Saat ini di tengah-tengah masyarakat kita sedang berlangsung perubahan social. Perubahan sosial yang terjadi secara terus menerus tetapi perlahan-lahan tanpa kita rencanakan disebut *unplanned social change*. Galibnya, perubahan sosial yang demikian disebabkan oleh perubahan dalam bidang teknologi atau globalisasi. Ada juga perubahan sosial yang kita rencanakan, kita desain, dan kita tetapkan tujuan dan strateginya. Inilah perubahan sosial yang kita sebut *planned social change*. (Jalaluddin Rakhmat, 1999: 45 -46).

Pada akhirnya menjadi jelas, bahwa manusia dan kehidupannya bukanlah sesuatu yang statis. Terdapat banyak variabel yang ikut menentukan gerak dinamika kehidupan manusia yang selalu ditandai dan disebut dengan terminologi perubahan. Perubahan-perubahan tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu aspek politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaannya. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, dalam makalah ini dicoba untuk memberikan telaah tentang Hak Asasi Manusia, nilai dan etika, serta gagasan baru dalam perspektif Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) seiring dengan adanya pergeseran-pergeseran yang terjadi dalam lingkaran kehidupan manusia. IPS merupakan bagian dari kurikulum sekolah dengan tanggung jawab utama membantu siswa mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat yang diantaranya diwujudkan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan, etika dan Hak Asasi Manusia. Tulisan ini dimulai dengan membahas tentang konteks HAM, Nilai dan Etika, Perspektif IPS dan gagasan baru yang ditawarkan.

Tujuan dan Isi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Ilmu pengetahuan Sosial atau IPS sebagai bagian dari system pembelajaran kita memiliki pekerjaan besar terhadap berbagai fenomena social yang terjadi saat ini. Pengetahuan Sosial merupakan fusi atau paduan dari sejumlah mata pelajaran



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

social diharapkan peran sertanya dalam memberikan kesempatan kepada anak didik untuk memahami problem-problem yang kompleks itu dari berbagai segi, meliputi: geografis, ekonomis, historis, sosiologis, antropologis dan sebagainya secara interdisipliner (Mukminan, 2006). Secara filosofis, tujuan substantive pembelajaran IPS dalam system pendidikan nasional kita adalah meningkatkan perilaku, sikap, ketrampilan, pengetahuan (*behavior, attitude, skills, knowledge=BASK*) para siswa mengenai urusan kemasyarakatannya.

Sampai hari ini terdapat ambiguitas dalam pembelajaran IPS. Pada satu sisi materi IPS dilihat sebagai materi yang mudah asal mau membaca, cukup hafalan dan belum menjadi bagian penting dalam proses pembentukan karakter bangsa yang sedang dihadapkan pada kehidupan global dengan urusan material yang mengemuka. Pada sisi yang lain, Ilmu Pengetahuan Sosial/ IPS digambarkan sebagai bidang studi yang rumit karena luasnya ruang lingkup, dinamika masyarakat yang terus bergerak dan berhubungan dengan nilai serta etika bangsa tertentu/ universal. Muriel Crosby menyatakan bahwa IPS diidentifikasi sebagai studi yang memperhatikan pada bagaimana orang membangun kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan anggota keluarganya, bagaimana orang memecahkan masalah-masalah, bagaimana orang hidup bersama, bagaimana orang mengubah dan diubah oleh lingkungannya, bagaimana orang menghargai sesama dan hak asasinya, bagaimana seseorang menjunjung tinggi nilai dan etika yang dianutnya (Leonard S. Kenworthy, 1981 : 7). Oleh karenanya dalam IPS dijelaskan tentang interaksi individu atau kelompok dalam masyarakat baik dalam lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Interaksi antar individu dalam ruang lingkup lingkungan mulai dari yang terkecil misalkan keluarga, tetangga, rukun tetangga atau rukun warga, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara dan dunia. Karakteristik tujuan IPS menurut Bruce Joyce (Leonard S. Kenworthy, 1981 : 7) memiliki tiga katagori yaitu : pendidikan kemanusiaan, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan intelektual.

Selanjutnya Barth dan Shermis (1977) mendefinisikan adanya tiga pandangan konsep IPS. Pertama, menekankan pada pembuatan keputusan sebagai ketrampilan yang harus dikuasai generasi muda. Kedua, menekankan pada ilmu-ilmu social untuk kepentingan studi yang lebih tinggi. Ketiga menekankan pada nilai-nilai dan perkembangan moral. Barth dan kawan-kawan (1977) menjelaskan Social studies sebagai an integration of experience and knowledge concerning human relations for the purpose of citizenship education. Tujuannya adalah pendidikan kewarganegaraan dan yang dibutuhkan untuk mencapai kewarganegaraan yang efektif meliputi: pengetahuan, ketrampilan yang dibutuhkan untuk memproses informasi, nilai-nilai dan kepercayaan dan partisipasi social.

Terkait dengan persoalan nilai dan etika serta Hak Asasi Manusia, pembelajaran IPS yang tepat sangat dibutuhkan di setiap bangsa dalam menjaga eksistensinya dan menghadapi perubahan.fenomena sosialmanusia yang terus berubah mencakup nilai dan etika serta kemanusiaan menjadi bagian penting kajian IPS dalam menyiapkan individu yang adaptif dan memiliki ketrampilan social yang baik sebagai warga negara yang produktif. Bagaimana konteks HAM dan nilai serta etika dapat dicermati dalam penjelasan berikut di bawah ini.



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (berikut ditulis dengan HAM) adalah hak yang dimiliki oleh manusia karena kelahirannya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau Negara. Hak Asasi Manusia tersebut tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh Negara (Marbun, B.N, 1996: 231). Adapun yang termasuk HAM meliputi antara lain : hak atas hidup; hak atas kemerdekaan, hak atas milik pribadi, baik atas keamanan, hak melakukan perlawanan terhadap penindasan, serta hak untuk mencapai kebahagiaan. Hak-hak seperti yang telah tersebut, merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia dan harus mendapatkan perlindungan. Dalam pandangan David L. Sills (1968: 540) disebutkan bahwa perlindungan terhadap HAM sudah dimulai sejak zaman Raja Hammurabbi dari Babylonia sekitar tahun 2131-2080 SM yang disebut dengan *The Code of The Babylonian King Hammurabbi*. Akhir-akhir ini dalam berbagai mass media sering dimunculkan berbagai kasus yang berkaitan dengan HAM, baik yang berbentuk pelanggaran maupun dalam bentuk tuntutan perlindungan. Dapat dicontohkan, adanya kasus penahanan individu secara sewenang-wenang, penyiksaan, pembunuhan massal, dan penghilangan paksa, serta pemerkosaan. Kesemuanya itu tidak saja telah menyebabkan ribuan nyawa hilang, namun juga penderitaan yang hebat. Di samping itu, ada bentuk pelanggaran HAM yang disebut dengan penindasan hak-hak politik dan diskriminasi dalam penegakkan hukum. (Abdul Hakim GarudaNusantara, 1998: 7).

Kehidupan sosial manusia tidak dapat terlepas dari tarik menarik tentang konsep HAM dengan struktur kekuasaan yang melingkupinya. Dalam pandangan Abdul Hakim Garuda Nusantara (1998:7) dijelaskan bahwa "...konsep hak asasi manusia dan aktualisasinya tidak bisa dilepaskan dari sejarah kekuasaan yang dimiliki oleh orang atau sekelompok orang". Oleh karena itu perwujudan HAM mempunyai korelasi yang positif dengan sistem kekuasaan yang ada sepanjang sejarah umat manusia.

1. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sejarah.

Lahirnya dokumen HAM sebagai dokumen resmi penegakkan hak-hak dasar umat manusia ditandai dengan terbitnya *Piagam Magna Charta* tahun 1215 di Inggris, yang membatasi kekuasaan raja. Selanjutnya disusul dengan keluarnya *Declaration of Independence* tahun 1776 di Amerika Serikat yang pada intinya, melindungi hak-hak individu dari tekanan. Inggris sebagai negara kolonisnya. Tidak lama kemudian muncul *Declaration I' home et du citoyen* tahun 1789 di Perancis yang menjamin persamaan kedudukan hukum bagi warga Perancis. Berakhirnya Perang Dunia II berikut dampak yang menyertainya, telah mengilhami warga dunia untuk lebih tegas dalam upaya perlindungan terhadap hak dasar setiap manusia Terbitlah *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948, dan oleh PBB dinyatakan sebagai



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

jaminan terhadap adanya keseriusan untuk perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia.

Peristiwa-peristiwa tersebut di atas menunjukkan bahwa ada hubungan korelasional antara krisis sosial kemanusiaan yang ada pada zamannya, dengan adanya ide-ide untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi. (Artidjo Alkostar, 1999: 22). Di samping itu munculnya dokumen-dokumen seperti tersebut di atas dikatakan ada kesesuaian dengan HAM masa kini, karena memperlihatkan adanya suatu kehendak agar terdapat jaminan terhadap pelanggaran dan krisis hak asasi, serta bentuk-bentuk pelanggaran terhadap HAM agar tidak terulang kembali. Dengan kata lain, perlu adanya tuntutan moral dan hukum yang mampu melindungi HAM.

Dicontohkan, krisis sosial yang berkaitan dengan hak asasi rakyat pada abad XVII mencapai titik kulminasi pada momentum revolusi. Revolusi yang terjadi pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang dirampas oleh penguasa dalam suatu sistem kekuasaan yang absolut. Kondisi ini berlangsung sampai pada abad XVIII, dengan berlangsungnya imperialisme dan kolonialisme bangsa Eropa di wilayah lain. Masa imperialisme dan kolonialisme ditandai dengan penekanan HAM penduduk koloni oleh para kolonialnya. Situasi imperialisme dan kolonialisme yang diwarnai dengan menginjak-injak HAM, telah mendorong lahirnya semangat nasionalisme.

Perjalanan HAM pada abad XX, ditandai dengan adanya semangat nasionalisme yang mengarah pada fasisme dan *Jingoisme*. (Artidjo Alkostar, 1999: 23). Misalnya dilakukan oleh Jerman, Italia, dan Jepang. Lahirnya dokumen *Universal Declaration of Human Right* setelah Perang Dunia II, tepatnya 1948, benar-benar merupakan suatu langkah penting umat manusia dalam menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak asasinya yang seringkali terinjak-injak dalam sejarah. (Davis, 1994: xii).

Wacana pemikiran HAM era *post modernisme* terus berkembang sesuai dengan filosofi yang melatar belaknginya Di sisi lain konteks budaya dan realitas sosial ekonomi menjadi hal penting dan akan mewarnai pemikiran HAM yang ada. Konsep HAM sebagaimana dikemukakan oleh Abdur Rahman Shad, (dalam Artidjo Alkostar, 1999: 24) mencakup "*right of parents children, husband and wife, relatives neighbours, teacher and their pupils, guest and the host or plants, the servants, friends, and the poor.*"

Perkembangan sosialisme abad XIX telah memperluas konsep HAM, tidak hanya untuk bebas dari campur tangan negara, tetapi juga hak untuk mengharuskan Negara-negara untuk memperbaiki tingkat ekonomi. (Davis, 1999: 8-9), guna mengangkat martabat manusia. Pikiran-pikiran tentang HAM sebagaimana tertuang dalam *Deklarasi Universal* tahun 1948 tampak seperti kutipan berikut ini.

Nilai martabat yang ada dalam diri manusia dan hak-hak yang sama dan tak terganggu dari seluruh anggota keluarga. Manusia adalah dasar untuk



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia. Rakyat Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam piagam ini menegaskan kembali keyakinan mereka akan hak-hak manusia yang asasi, dalam kelayakan martabat dan nilai pribadinya, dalam persamaan hak antara lelaki dan wanita dan telah memutuskan mengusahakan kemajuan sosial dan taraf hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas. (To Thi Anh, 1985: 35).

2. Indonesia dan HAM

Pengalaman pahit bangsa. Indonesia, sebagai obyek penderitaan dan perkosaan HAM selama dijajah oleh kolonialis Belanda dan fasis Jepang, mengakibatkan para pejuang kemerdekaan Indonesia lebih *luwes* dalam memandang dan mensikapi permasalahan kemanusiaan dan keadilan berkaitan dengan hak dasar setiap umat manusia. Khususnya permasalahan yang berkaitan dengan tata pergaulan internasional. Perhatian ini tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, "...bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. (Bahan Penataran P4, 1990).

Di sisi lain, dalam upaya membantu menegakkan dan menjunjung tinggi hak asasi bangsa lain, peran Indonesia secara historis telah ditunjukkan dalam mompelopori penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955. Konferensi tersebut menghasilkan Dasasila Bandung yang secara tegas berisi komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati HAM. Pernyataan tersebut mengandung konsekuensi gugatan moral manakala ada tingkah laku baik nasional ataupun internasional yang tidak konsisten. Dengan demikian, cukup beralasan bagi pemerintah RI, jika merasa terganggu atas tindakan pelanggaran HAM di berbagai wilayah seperti Timor-Timor (sebelum lepas dari kesatuan RI karena opsi referendum September 1999), Aceh, dan Irian Jaya dalam diplomasi luar negeri. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa realisasi penghargaan HAM akan sangat tergantung pada struktur kekuasaan yang mengikat. Kediktatoran berkorelasi positif dengan pemeriksaan HAM. Kekuasaan yang tidak menjunjung tinggi nilai keadilan, memberi peluang terdapatnya pelanggaran HAM. Ralf Dahendorf (1992, dalam Artidjo Alkostar, 1999) berpendapat,

...bahwa untuk menjamin penghargaan dan perlindungan terhadap HAM diperlukan ketentuan hukum yang tidak memihak. Terdapatnya perlindungan hukum terhadap ketentuan HAM, mensyaratkan mekanisme kontrol sosial yang tegas. Begitu pula keterlibatan lembaga kemasyarakatan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab.

Pasang surut dan perkembangan HAM di Indonesia selalu terkait dengan



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

lembaga yang mengemban hak-hak strategis masyarakat seperti pers, pengadilan, perguruan tinggi, partai politik, DPR, LSM, dan yang lainnya. Tiga puluh dua tahun perjalanan sejarah bangsa, Indonesia, khususnya masa Orde Baru terdapat hambatan-hambatan tertentu yang menyebabkan tersendatnya proses perlindungan dan penghargaan terhadap HAM. Terdapat banyak kasus yang tersingkir atau disingkirkan kalau menyangkut masalah-masalah HAM. Di sisi lain, keberadaan lembaga hukum belum sepenuhnya *independent* dalam mengemban tugas utamanya. Akibatnya melahirkan praktek-praktek diskriminasi terhadap penyelesaian pelanggaran hukum yang terjadi. Diskriminasi hukum yang ada justru telah melahirkan kejahatan dan kemewahan segelintir orang di tengah kemiskinan masyarakat kebanyakan. Kondisi ini menurut Artidjo Alkostar (1999) sangat berbahaya, dan bersifat eksplosif yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan ledakan. Tidak aneh, bila pada akhirnya melahirkan kebencian yang mendalam dan sekaligus menjadi api dalam sekam bagi suatu kebermaknaan hidup yang diharapkan.

Nilai dan Etika

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, manusia yang disebut pula sebagai *homo duplex*, tidak saja cukup dikenal sebagai makhluk biologis dan ekonomis, akan tetapi disebut juga sebagai makhluk sosial. Hubungan sosial merupakan bentuk interaksi sosial yang pertama, dan sekaligus merupakan perintah alam. Dengan demikian haruslah interaksi sosial ini berjalan dengan tertib, sebagaimana alam menghendaki. Dalam upaya menjamin adanya keteraturan dan ketertiban tersebut, terdapat serangkaian petunjuk tentang bagaimana manusia itu berinteraksi dengan manusia yang lainnya di masyarakat. Di sinilah lahir apa yang disebut sebagai nilai dan etika, sebagai suatu acuan yang tertulis ataupun tidak, dalam sedap perbuatan ataupun tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat.

Secara leksikal nilai diartikan sebagai hal-hal yang penting dan berguna bagi kemanusiaan. (Kubi, 1996, 470). Keterkaitannya dengan kehidupan manusia akan lahir apa yang disebut dengan nilai budaya. Nilai budaya dalam konteks ini diartikan sebagai konsep abstrak mengenai masalah dasar yang sangat penting dan bernilai bagi kehidupan manusia. Sementara itu, etika, berasal dari kata Yunani, "athos", yang berarti adat, watak, akhlak, perasaan, sikap dan cara, berpikir dari bentuk jamak "ta, etha. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, (1996: 271), kata, etika merupakan turunan dari kata etik yang berarti kumpulan nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Kemudian lahir istilah etika, yang diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral.

Memperhatikan pengertian-pengertian di atas, nilai dan etika dipandang sebagai sesuatu yang positif dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan manusia dalam masyarakatnya. Dengan demikian, pada hakikatnya tingkah laku manusia tidak akan mempunyai kebebasan penuh, karena ada ikatan nilai dan etika sebagai pengarah dan petunjuk dalam mencari



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

kebermaknaan hidup. Semua petunjuk tersebut merupakan tatanan dasar yang sekaligus menyiratkan suatu etik moral positif bagi masyarakatnya. Mudji Sutrisno, (1998) dalam salah satu tulisannya menjelaskan bahwa:

...nilai dimaksudkan sebagai yang dipandang berharga hingga layak digenggam menjadi acuan-acuan. Mulai dari yang fisik kulit hingga yang inti. Mulai dari yang instrumental sampai yang bernilai sebagai tujuan. Nilai adalah sesuatu yang positif, dihargai, dipelihara, diagungkan, dihormati, dan membuat orang gembira.

Proses penilaian pada, setiap individu diintegrasikan dan diorganisasikan oleh tujuan serta logika. Hal inilah yang kemudian disebut dengan etik pribadi, Sutan Takdir Alisyahbana, (1977: 11-12) mengatakan bahwa:

... etik pribadi berpusat pada, kata hati. Sebaliknya etik masyarakat terjelma dalam adat istiadat, kebiasaan, maupun undang-undang. Hal-hal inilah yang kemudian akan menjadi norms dan akan sangat menentukan bagi munculnya perilaku individu sebagai anggota masyarakat.

Pada umumnya, nilai dan etika yang dikembangkan oleh suatu kelompok masyarakat dan berlaku setempat. Setiap kelompok masyarakat mempunyai *style* atau gaya tersendiri tentang nilai dan etika yang dikembangkan. Dalam arti, tatanan nilai dan etik dalam masyarakat tertentu belum tentu berlaku dalam masyarakat yang lain. Hal ini dapat dipertegas dengan adanya adat istiadat yang berbeda. Masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat pluralis, dipastikan mempunyai ribuan sistem nilai dan etika yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok masyarakatnya. Akan tetapi, kehadiran Pancasila sebagai suatu sumber nilai, akan menjiwai setiap tatanan nilai dan etika yang ada. Pancasila telah diakui sebagai pengikat yang kuat, dan sekaligus menjembatani kemungkinan munculnya berbagai konflik yang disebabkan karena perbedaan nilai dan etika yang ada. Bhineka Tunggal Ika, di satu sisi mampu menjadi pengikat bagi multikultur yang ada di Indonesia Akan tetapi, lahirnya suatu sistem kehidupan politik yang belum demokratis, menyebabkan banyak ikatan nilai dan etika yang berbeda dikemas dalam kepentingan-kepentingan tertentu.

Dalam kenyataannya, realisasi proses penilaian, baik menyangkut etik pribadi ataupun etik masyarakat akan selalu ada perseberangan. Individu mesti tunduk kepada dua sistem norma yang berpusat pada kata hatinya, dan tersimpul dalam adat istiadatnya, kebiasaan, dan hukum masyarakat. Mencermati pandangan tersebut dapat dicontohkan dengan mengamati perkembangan ilmu dan teknologi pada saat ini. Ilmu sering dikatakan sebagai wilayah kajian yang bebas nilai untuk menjaga obyektivitas kajiannya. Akan tetapi sebebaskan apapun hasil kajian ilmu dan teknologi tersebut, dalam sosialisasinya tidak dapat dilepaskan dari acuan-acuan dasar kehidupan manusia yang akan dituangkan dalam nilai dan etika yang melatar belakanginya, agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat pengguna ilmu itu sendiri.

Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus akan menjadi jiwa kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Aktualisasi nilai Pancasila akan



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

tercermin dalam suatu sistem nilai dan etika kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Adanya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila secara tepat, tulus, dan ikhlas, dapat dijadikan sebagai *filter* dalam menghadapi perputaran zaman yang selalu berubah ini. Permasalahannya, secara ideal, bahwa dalam kehidupan manusia itu antara *das sein* dan *das sollen* tidak pernah bertemu dengan sejajar. Antara *das sein* dan *das sollen* akan selalu menunjukkan kesenjangannya. Untuk itu peranan nilai dan etik dalam kehidupan manusia sangat penting, guna dijadikan sebagai pedoman untuk mempersempit setiap kesenjangan yang ada. Baik yang berkaitan dengan tingkah laku ataupun aktivitas kehidupan sosial yang lain. Perjalanan hidup manusia mengalami pasang surut. Lebih-lebih pada saat dihadapkan pada krisis dan tantangan alam yang dihadapi. Pasang surutnya perjalanan hidup manusia ini otomatis akan berpengaruh terhadap kultur dan peradaban yang melingkupinya, serta sistem nilai dan etika yang berlaku. Naik turunnya peradaban manusia ini oleh Arnold Toynbee, (1972) dikatakan sebagai *rise and fall* dalam kehidupan manusia.

Berbagai kondisi dikatakan menjadi penyebab perubahan peradaban manusia. Perubahan itu antara lain terpicu oleh; (1), semakin pesatnya perkembangan dan perluasan jaringan komunikasi. Tidak satupun peristiwa di dunia ini yang dapat tersembunyikan, termasuk kebiasaan dan cara hidup modern dengan sangat cepat ditularkan diseantero dunia; (2), pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi, yang disertai dengan perubahan gaya hidup agraris menuju gaya hidup metropolis; (3), adanya perubahan terhadap cara-cara berpikir tradisional, kearah cara berpikir baru yang sering dikatakan lebih sesuai dengan tantangan dan situasi baru dalam masyarakat sekarang.

Mengamati berbagai bentuk motif perubahan tersebut, ketika masyarakat, katakanlah sudah mempunyai sistem nilai dan etika tertentu, maka ketika bertemu dengan nilai dan etika yang baru akan terjadi tiga kemungkinan, seperti: (1), asimilasi, dalam ini akan terjadi proses saling mengambil nilai-nilai yang terbaik, (2), konfrontasi, dalam hal ini akan terjadi saling berbenturan antara satu nilai dengan nilai yang lain; (3), adaptasi, yang dimaksud adalah konfrontasi damai. Artinya yang kuat akan menyerap yang lemah, dan yang lemah akan menyesuaikan.

Andaikata terjadi persimpangan yang dikhawatirkan akan menimbulkan ketegangan, kecurigaan, bahkan permusuhan, perlu dicari nilai dan etik yang lebih *civility* (Mudji Sutrisno, 1998). Dalam konteks ini akan lebih tepat dikedepankan nilai dan etika kemasyarakatan yang menghargai adanya kemajemukan, keterbukaan, dan demokrasi. Nilai dan etik yang bersifat paternalistik, feodalistik, tampaknya kurang relevan dalam rangka menghadapi tantangan dan perkembangan yang ada.

Sementara itu dalam menghadapi tantangan yang berasal dari pengaruh dunia global, nilai dan etika yang sudah dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat akan tetap dijadikan sebagai pedoman yang mendasari tingkah lakunya dengan penuh keseimbangan. Hidup manusia dikatakan akan mencapai kebahagiaan jika dapat dikembangkan keselarasan dan keseimbangan. Baik manusia hidup sebagai pribadi, manusia dan hubungannya dengan



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

masyarakat, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan, maupun manusia dalam rangka mengejar kemajuan lahiriah.

Gagasan Baru Pembelajaran IPS Berkaitan dengan Nilai dan Etika serta HAM

Nilai dan etika serta HAM menjadi bagian dari peradaban manusia menjadi bagian penting dalam implementasi pembelajaran IPS saat ini dalam menyiapkan generasi mendatang dengan life skill matang dalam menghadapi dan mengatasi berbagai problema social yang dihadapi. Kedudukan IPS dalam dunia pendidikan diharapkan menjadi bagian sangat penting dalam melakukan transformasi nilai-nilai kehidupan manusia. Dalam hal ini nilai dimaksudkan sebagai sesuatu yang dianut sebagai tujuan dalam kehidupan dengan fungsi sebagai penuntun perilaku dalam mencapai standar kehidupan tertentu. Standar kehidupan yang universal, pada umumnya adalah kehidupan yang dapat mencerminkan kehidupan dalam damai dan harmoni, saling menghargai, saling memberikan kesempatan, saling mendengarkan, menyatu dalam perbedaan yang diantaranya adalah prinsip-prinsip HAM. Capaian akhir dari proses pendidikan yang memberlakukan PIPS sebagai salah satu tujuan pembelajaran adalah mendewasakan diri peserta didik sehingga mampu menjadi manusia yang mandiri, sadar akan hak dan kewajibannya dan dapat memecahkan masalah kehidupan yang dihadapinya. Di sinilah pentingnya peran guru dalam mengajarkan PIPS yang sesungguhnya. Apabila pembelajaran IPS telah mengarah pada prinsip pembelajaran yang selalu mendekati dengan landasan filosofis maka capaian untuk membentuk kepribadian SMART bagi generasi mendatang bukanlah sesuatu yang menyulitkan. Kepribadian SMART adalah kepribadian yang didalamnya mengandung karakter sebagai berikut mempunyai banyak teman di sekolah maupun di masyarakat, banyak bersosialisasi di sekolah atau di lingkungan tempat tinggal, tampak sangat mengenal lingkungannya, terlibat dalam kegiatan kelompok di luar jam sekolah, berperan sebagai “penengah keluarga” ketika terjadi pertikaian, menikmati permainan kelompok, berempati besar terhadap perasaan orang lain, dicari sebagai “penasehat” atau “pemecah masalah” oleh teman-temannya, menikmati mengajari orang lain, mencintai negerinya, mencintai produksi negerinya, mampu memberikan kesempatan pada orang lain untuk berpendapat dan sebagainya (Enok Maryani, 2009).

Berakhirnya Perang dingin tampaknya membuka fenomena baru bagi sejarah umat manusia. Dikenal apa yang disebut era global, era keterbukaan, dan kecenderungan semakin hilangnya sekat pembatas hubungan antar bangsa. Secara tidak disadari, globalisme telah membawa prinsip nilai dan etika modernitas yang sangat berbeda, bahkan dapat dikatakan sangat berlawanan dengan sistem nilai dan etika lokal Indonesia khususnya. Atau dengan kata lain, globalisasi seringkali dilihat sebagai sumber penyebab munculnya nilai rasionalisasi, konsumerisme, dan komersialisasi yang akan mengakibatkan hancurnya tatanan identitas nilai dan etika nasional. (Lambang Trijono, 1996: 136-137). Pandangan ini tidak mungkin untuk dipersalahkan. Persoalan yang sangat serius dan memerlukan pemecahan yang



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

jelas adalah bahwa kita sekarang sedang menghadapi krisis nilai sebagai perekat persatuan dan kesatuan, di saat dihadapkan pada kehidupan kapitalisme dan materialisme. Pada situasi seperti inilah guru IPS, pakar IPS, dan para pembuat kebijakan terkait dengan pembentukan karakter kebangsaan tidak dapat diabaikan. Sangat tidak mudah untuk memberikan pembelajaran IPS di masyarakat karena tingginya dinamika masyarakat itu sendiri.

Nilai-nilai yang berkaitan dengan HAM dan budaya, lokal menjadi sorotan internasional. Terjadilah pergeseran nilai dan etika pada seluruh sendi kehidupan masyarakat. Sementara, itu perilaku represif dari aparat keamanan seringkali jauh dari nilai dan etika, yang selama ini dijadikan sebagai pedoman tingkah laku dan kehidupan dalam bermasyarakat. Kekuasaan sebagai salah satu penentu proses dinamika kehidupan masyarakat, menjadi pemegang tunggal dari seluruh proses asimilasi, konfrontasi ataupun adaptasi nilai untuk memenangkan kepentingan diri dan kelompoknya. Pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM erat kaitannya, dengan kepentingan kekuasaan. Dominasi kekuasaan pada sistem hukum tidak disertai dengan contoh perilaku dan nilai etika yang positif bagi masyarakat yang masih bersifat paternalistik. Masyarakat dihadapkan pada, tatanan nilai dan etika, "yang salah jadi benar dan yang benar jadi salah". Norma, yang berlaku dalam masyarakat sudah banyak tercemar oleh kepentingan individu dan kelompok yang didasari oleh semangat hidup *hedonisme*. Tidak ada, lagi yang dapat dijadikan sebagai pegangan, baik itu etika ataupun sistem nilai. Pancasila sebagai sumber nilai, ternyata telah digunakan sebagai alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya, dengan retorika, politik dan menjungkirbalikkan nilai-nilai luhur Pancasila. Satu-satunya nilai yang diagungkan adalah dominasi materi atau uang. Sisi-sisi kehidupan yang humanis, religius, dan nilai-nilai hakiki manusia, telah direduksi habis dan diganti dengan uang. (Mudji Sutrisno, 1998).

Bagaimana IPS dapat menjawab berbagai bentuk tantangan seperti ini. ? Dalam menghadapi era global yang didominasi nilai dan menjunjung tinggi profesionalisme serta kompetisi kualitatif yang hebat, diperlukan adanya ide-ide baru dengan kecemerlangannya. Era global tidak dapat dilihat dengan sebelah mata, dengan segala berkah positif dan negatifnya. Era global adalah kenyataan yang harus dihadapi dengan penuh kesiapan dan kepercayaan diri, termasuk guru IPS dan para pakar IPS kita saat ini.

Persoalan-persoalan ini perlu menjadi renungan bersama, dalam mencari suatu kehidupan baru yang lebih manusiawi. Penghargaan terhadap HAM, erat kaitannya dengan sistem kekuasaan, demikian juga nilai dan etika. Oleh karena itu, sangat mendesak terwujudnya suatu sistem kekuasaan yang mau menjunjung tinggi HAM, dan penegakkan nilai dan etika, dalam kehidupan bersama yang berkeadilan. Sebagai idiologi universal, HAM pada abad XXI ini, menjadi tolak ukur dalam menopang berbagai fenomena yang berlaku termasuk nilai dan etika. *Open society*, konsep yang dikemukakan oleh George Soros, barangkali dapat dijadikan sebagai pijakan dalam upaya penegakkan HAM dan sistem nilai dan etika yang kuat. *Open society* secara konseptual memang mengedepankan adanya *clean government*, yang menjauhkan diri dari



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

praktek kenegaraan yang merugikan masyarakat banyak. Sementara itu keterkaitannya dengan nilai dan etika, perlu dibangkitkan kembali upaya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara konkret. Pancasila sebagai ideologi bangsa, memuat banyak kandungan nilai, yang tidak akan menimbulkan kekhawatiran terhadap derasnya pengaruh nilai dan etika asing melalui proses globalisasi. Guru IPS dengan kompetensi inovatifnya, keterbukaan hatinya terhadap perubahan, serta tanggung jawab mulianya pada profesi yang dilaksanakan hendaknya termotivasi dengan perkembangan ini. Para pakar IPS dengan seluh potensi keilmuan yang dimiliki, diharapkan terus dapat mengalirkan ide-ide segar ke IPS an dalam menjawab tantangan jaman saat ini, baik secara vertikal maupun horizontal.

PENUTUP

Kehidupan sosial masyarakat senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut dapat dilihat baik dalam konteks keruangan (tempat tinggal) maupun konteks waktu. Perkembangan kehidupan masyarakat yang ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi pada pihak yang lain telah memunculkan berbagai ketimpangan moral, akhlak, social-ekonomi, politik dan jati diri bangsa, termasuk di dalamnya penyimpangan nilai dan etika serta pelanggaran HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembelajaran IPS dalam kurikulum pendidikan nasional diajarkan dalam upaya menyiapkan sedini mungkin peserta didik untuk dapat beradaptasi dalam kehidupannya secara terprogram, berkesinambungan atau berkelanjutan. Peranan aktif dari seluruh komponen system pembelajaran mencakup guru, siswa, kepala sekolah, pengambil kebijakan di kalangan birokrasi dan para pakar IPS mampu mendorong terbentuknya suasana transfer of knowledge yang ideal dengan segala perangkatnya. Betapapun kondisi Indonesia sat ini belum begitu menguntungkan, namun kepekaan guru, manajemen sekolah, para birokrat pendidikan dan pakar IPS terhadap berbagai fenomena social akan menjadi inspirasi dalam proses tranformasi nilai, sikap dan perilaku dalam mengembangkan potensi manusia Indonesia yang sesungguhnya. Amin.



SEMINAR NASIONAL

"Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global"

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, Garuda Nusantara, (1998), "Rekonsiliasi dalam perspektif HAM", *Kompas*, 10 Desember.
- Artidjo, Alkostar, (1999), "Prospek Hak Asasi Manusia Abad XXI", *Jurnal Media Inovasi*, No. 1/tahun IX, Yogyakarta UMY.
- B& N. Marbun, (1996), *Kamus Politik*, Jakarta- Sinar Harapan
- Barr, Barth dan Shermis. (1977). *Defining The SocialStudies*. Virginia: national Council for The Social Studies.
- BP 7 Pusat, (1990), *Bahan Penataran P4, UUD 1945. GBHN*, Jakarta; BP7 Pusat
- Dahrendorf,Ralf,(1992) *Refleksia atas Revolusi di Eropa*, (terjemahan), *Asasi Manusia sebuah, bunga rampai*, Jakarta: Obor Indonesia.
- Enok, Maryani. (2009). "Transformasi Nilai dalam Pembelajaran IPS". *Makalah Seminar Program Stdi Pendidikan Sejarah, FKIP UHAMKA*.
- Hamid Hasan, S., (1996), *Pendidikan Ilmu sosial*, Jakarta: Depdikbud, Dirjen Dikti.
- Jalaluddin Rahmat, (1999), *Rekayasa social reformasi atau revolusi*. Bandung. RosdaKarya.
- Lambang Trijono, (1996), "Globalisasi modernitas dan krisis Negara bangsa: tantangan integrasi nasional dalam konteks global", analisis. CSISJakarta; Gramedia
- Davis, Peter, (1994), "Human Right", alih bahasa: A.Rahman Zainuddin, *Hak-hak*
- Mudji Sutrisno,(1998) "Tantangan kebudayaan" *Tiras*, No. 6/tahun III/16 Maret
- Martorella, Peter, H. (1985). *Elementry Social Studies : Developing Reflective, Competent and Concerned Citizens*. Boston & Toronto : Little Brown and Company.
- Pusat Pembinaan dan pengembangm bahasa, (1996), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Sills, david L., (1968), *International Encyclopedia of the social sciences*, Vol 6, The Macmillan Company.The
- Sutan Takdir Alisyahbana, (1977), *Perkembangan sejarah kebudayaan Indonesia, dilihat dari Jurusan nilai-nilai*, Jakarta; Idayu Press
- To thi Anh, (1985) "Eastern and Western Cultural Values", alih bahasa; John Yap Pariera, *Nilai budayatimur dan barat konflik atau harmoni*, Jakarta; Gramedia.



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

Wiriaadmadja, Rochiati. (2003). “Pembelajaran IPS Tingkat Sekolah dasar”.
Jurnal PIPS : Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial. Nomor 20 Tahun XI Edisi Januari – Juni ISSN: 0854-5251.

Wahab, Aziz. (2003). “ Tantangan Pembelajaran IPS di Sekolah”. *Jurnal PIPS : Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial. Nomor 20 Tahun XI Edisi Januari – Juni* ISSN: 0854-5251.